PARADOKS KEBIJAKAN DI ERA OTONOMI DAERAH: STUDI KASUS KEBIJAKAN BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH

Imelda
Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
imeldamatahari223@gmail.com

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan sebuah era kekuasaan yang dimulai setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Di era ini setiap provinsi perlu menentukan identitas lokalnya (baca: budayanya) dan dalam hal kebahasaan setiap provinsi perlu membuat kebijakan bahasa daerah untuk keperluan identitas lokal. Namun demikian, kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat ratusan bahasa sehingga akan sulit menetapkan satu identitas budaya untuk mewakili sebuah provinsi. Persoalannya ialah, dalam realitas masyarakat yang sangat heterogen, bagaimana kebijakan bahasa yang ada pada saat ini dan bagaimana respons masyarakat yang identitas etnisnya tidak terakomodasi. Makalah ini akan membahas kasus kebijakan bahasa daerah di Provinsi Jawa Tengah melalui kajian dokumen kebijakan, literatur dan wawancara kelompok etnis Sunda-Brebes di Provinsi Jawa Tengah. Komunitas ini penting diteliti karena mereka merupakan penduduk asli di Jawa Tengah meskipun memiliki identitas yang berbeda. Perlu diketahui pula bahwa penelitian kualitatif yang menggunakan data wawancara ini menggunakan purposive sampling dalam pemilihan sampel. Hal ini penting dilakukan karena penulis lebih menekankan pada subjek penelitian yang merasakan efek langsung dari penerapan kebijakan bahasa di Jawa Tengah, terutama dalam bidang pendidikan. Untuk keperluan makalah ini, penulis hanya menggunakan satu sampel data wawancara dari Kecamatan Brebes. Namun demikian, meskipun jumlahnya kecil pendapatnya memberikan gambaran masyarakat Sunda-Brebes mengingat ia tidak hanya seorang asli Sunda-Brebes, tetapi juga guru bahasa daerah dan seniman Sunda. Perlu pula dicatat bahwa wawancara dilakukan kurang lebih selama dua jam dan pertanyaan dibangun dalam diskusi dari pertanyaan "Apa yang Anda rasakan dan Anda lakukan ketika kebijakan bahasa Jawa diterapkan di seluruh Provinsi Jawa Tengah? Kedua pertanyaan pokok ini penting karena perasaan dan tindakan/perilaku merepresentasikan kesetujuan ataupun penolakan. Temuan menunjukkan bahwa Jateng telah menetapkan dan menerapkan (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa, (2) Peraturan Gubernur Jateng No. 57/2013, dan (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2014. Saat ini seluruh sekolah di Jateng mengajarkan bahasa Jawa, termasuk wilayah orang Sunda-Brebes. Terhadap kebijakan tersebut, seorang guru sekolah dasar yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun di Kecamatan Salem berpendapat bahwa "Kami merasa terjajah." Pernyataan itu merupakan salah satu ekspresi jujur yang didapatkan oleh peneliti ketika melakukan pengumpulan data. Sebagai guru dan seniman yang memiliki keterikatan dengan budaya Sunda, sekolahnya tetap mengajarkan aksara Jawa tetapi ia sendiri masih melatih murid-muridnya bermain karawitan. Ia juga mengklaim bahwa anak-anak asuhannya selalu memenangkan pertandingan seni Sunda. Apa yang diungkapkan dan yang dilakukan ini merupakan sebuah artikulasi kelompok minoritas yang bertahan dalam kondisi tidak menguntungkan secara politis. Di sisi lain, pengajaran bahasa Jawa masih memiliki tantangan teknis karena tidak memiliki guru yang memadai. Dengan demikian, pertanyaannya kembali apakah kebijakan yang bersifat homogen tersebut perlu dipertahankan di tengah masyarakat yang heterogen dan memiliki kesetaraan hak budaya.
Kata kunci: *Otonomi Daerah, Kebijakan Bahasa, Provinsi Jawa Tengah, Sunda-Brebes*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dimulai, yaitu ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) berlaku di seluruh wilayah Indonesia, setiap provinsi menonjolkan identitas kedaerahannya. Salah satu elemen identitas yang penting ialah bahasa lokal. Hampir setiap provinsi memilih bahasa daerahnya, seperti bahasa Jawa yang menjadi identitas Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY.

Namun demikian, penentuan bahasa sebagai identitas provinsi ini menjadi persoalan karena di Indonesia terdapat ratusan bahasa. Ethnologue (Ebenhard, Simons, & Fennig 2021) mencatat Indonesia memiliki 722 bahasa dengan 710 bahasa masih hidup dan 12 sudah punah. Kemudian, sumber yang sama menuliskan bahwa di antara bahasa yang masih hidup hanya 704 bahasa asli penduduk Indonesia. Dengan jumlah bahasa yang ratusan dan 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, tampaknya sulit untuk memilih bahasa mana yang akan dijadikan identitas lokal. Apalagi persebaran bahasa ini tidak merata dari barat hingga timur Indonesia: semakin ke timur, jumlah bahasa semakin meningkat. Persoalannya kemudian ialah, dalam masyarakat yang sangat heterogen secara bahasa, bagaimana kebijakan bahasa yang ada pada saat ini dan bagaimana respons masyarakat yang identitas etnisnya tidak terakomodasi.

Makalah ini akan secara spesifik mendiskusikan kebijakan bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi itu menarik karena, berbeda dari tetangga provinsinya, seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang penduduk aslinya relatif homogen orang Jawa. Di Jawa tengah, terdapat orang Sunda di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selain itu, masyarakat Jawa Tengah memiliki varian dialek bahasa Jawa yang berbeda apabila dibandingkan dengan Yogyakarta, Semarang, ataupun Solo.

METODE PENELITIAN

Makalah ini akan membahas kasus kebijakan bahasa daerah di Provinsi Jawa Tengah melalui kajian kualitatif melalui dokumen kebijakan, literatur dan wawancara kelompok etnis Sunda-Brebes di Provinsi Jawa Tengah.

Kajian dokumen Kebijakan Bahasa di Jawa Tengah dilakukan untuk mengetahui secara legal apa dasar pemikiran dan kebijakan bahasa yang ada di sana. Informasi ini penting untuk memberikan landasan fundamental tentang pengakuan pemerintah provinsi tentang kebijakan bahasanya. Kajian literatur dari kliping koran dan hasil penelitian terdahulu dikaji untuk mendapatkan informasi mendasar tentang masyarakat Provinsi Jawa Tengah secara umum, seperti etnisitas, bahasa, lokasi (orang Sunda), sejarah ringkas. Informasi itu penting karena akan memberikan deskripsi subjek kajian ini, terutama Orang Sunda di Provinsi Jawa Tengah.

Data juga diperoleh dari wawancara Orang Sunda di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Subjek yang diwawancarai dipilih menggunakan purposive sampling. Model sampling ini dipilih karena penulis lebih menekankan pada subjek penelitian yang merasakan efek langsung dari penerapan kebijakan bahasa di Jawa Tengah, terutama dalam bidang pendidikan. Untuk keperluan makalah ini, penulis hanya menggunakan satu sampel data wawancara. Namun demikian, meskipun jumlahnya kecil pendapatnya memberikan gambaran masyarakat Sunda-Brebes mengingat ia tidak hanya seorang asli Sunda-Brebes, tetapi juga guru bahasa daerah dan seniman Sunda. Wawancara dilakukan selama dua jam dan pertanyaan dibangun dalam diskusi dari pertanyaan "Apa yang Anda rasakan dan Anda lakukan ketika kebijakan bahasa Jawa diterapkan di seluruh Provinsi Jawa Tengah? Kedua pertanyaan pokok ini penting karena perasaan dan tindakan/perilaku merepresentasikan kesetujuan ataupun penolakan. Analisis yang dilakukan ialah analisis isi. Hal ini dilakukan untuk memahami bagaimana masyarakat merespons kebijakan pengajaran bahasa Jawa di wilayah yang penduduknya beretnis Sunda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi berbagai temuan hasil penelitian dan diskusinya. Ada beberapa bagian yang dimaksud, antara lain: (1) deskripsi tentang Orang Sunda di Jawa Tengah, (2) Kebijakan Bahasa Jawa di Jawa Tengah, dan (3) respons orang Sunda terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah.

Orang Sunda di Jawa Tengah

Orang Sunda di Jawa Tengah merupakan komunitas penduduk asli beretnis Sunda. Dalam sebuah catatan perjalanan Bujangga Manik, seorang Pendeta Hindu yang melintasi Jawa-Bali mencatat bahwa wilayah Kerajaan Sunda sampai di Cipamali, sebuah sungai yang melintasi Kabupaten Brebes saat ini (Noorduyn, 2019). Saat ini orang Sunda di wilayah tersebut masih menggunakan bahasa Sunda dialek Brebes yang menurut hasil wawancara dengan penduduk setempat lebih dekat dengan bahasa Sunda yang ada di Indramayu.[1]

[1] Penelitian Lapangan Januari-Februari 2021.

Peta Kabupaten Brebes
Sumber: Kontributor Wikipedia, 2021

Berdasarkan wawancara dengan Pengurus Paguyban Pasundan Cabang Kabupaten Brebes, orang Sunda berada di beberapa kecamatan. *Pertama*, orang Sunda Mayoritas terdapat di Kecamatan Salem, Bantarkawung dan Banjarharja. Kedua, sebagian kecil orang Sunda tinggal pula di Kecamatan Ketanggungan, Lorsari, Tanjung, Kersana, dan Larangan. Secara keseluruhan provinsi, orang Sunda di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, hanya sebesar 1,05 Persen dari 30.917.006 Jiwa penduduk (Suryadinata, Arifin, & Ananta, 2003). Sumber yang sama juga mencantumkan kelompok etnis Jawa sebanyak 97,96 persen. Dengan demikian, kelompok etnis Sunda meskipun penduduk asli setempat, tetapi jumlahnya sangat kecil dan dapat disebut minoritas secara jumlah.

Kebijakan Bahasa Jawa

Kebijakan berkaitan dengan bahasa, sastra, dan aksara Jawa telah dikeluarkan sebanyak tiga kali, antara lain: (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa, (2) Peraturan Gubernur Jateng No. 57/2013, dan (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2014. Akan tetapi, dari ketiga peraturan tersebut, hanya yang pertama dan kedua yang memiliki pengaruh besar terhadap pengajaran bahasa Jawa di Jawa Tengah dan subbab ini hanya akan mendiskusikan dua peraturan pertama.

Perda pertama memberikan landasan argumentasi untuk pelestarian bahasa Jawa, yaitu kekhawatiran kepunahan bahasa berdasarkan tren penggunaan bahasa Jawa yang menurun di kalangan generasi muda. Secara lebih gamblang, perda ini bertujuan melindungi, membina dan mengembangkan bahasa, sastra dan aksara Jawa (Pasal 2, Perda 9/2012). Selain itu, ditentukan pula bahwa ranah formal (pendidikan) dan informal (keluarga dan Masyarakat) menjadi sasaran pelestarian bahasa Jawa (Pasal 11, Perda 9/2012).

Pergub Peraturan Gubernur Jateng No. 57/2013 ialah Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 9/2012. Dalam hal pelestarian bahasa di ranah formal ada beberapa keputusan penting yang akan diterapkan. *Pertama*, tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas wajib melaksanakan pengajaran bahasa dan aksara Jawa (Pasal 12, ayat 1, Pergub 57/2013). *Kedua*, mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran terpisah yang diberikan alokasi waktu 2 jam pelajaran (Pasal 2, 3, & 4, Pergub 57/2013). Ketiga, ragam bahasa Jawa yang diajarkan bergantung pada ragam bahasa di wilayah setempat

(Pasal 2, Pergub 57/2013). Keempat, apabila ditemukan kesulitan dalam implementasi, baik karena persoalan geografis maupun kultural, akan dilakukan perbaikan (Pasal 12, ayat 2, Pergub 57/2013).

Respons Orang Sunda terhadap Kebijakan Bahasa Jawa

> *Kadang hati kecil saya berkata, Ya Allah kok seperti ini, gitu. Kita sebagai seorang yang berada di bawah diharuskan mengajar bahasa Jawa. … . Gurunya saja dengan tergopoh-gopoh, karena kita perintah ya hehe ... jadi. Istilahnya diharuskan mengajar walaupun saya sebagai orang yang sangat mencintai bahasa saya, bahasa Sunda dan budayanya hati kecil gak terima, sebenernya.*
>
> (Sumber: wawancara DM, Januari-Februari 2021)

Penerapan kebijakan muatan lokal bahasa Jawa telah dilaksanakan sejak kurikulum tahun 2013 diimplementasikan, tepatnya setelah Pergub Peraturan Gubernur Jateng No. 57/2013 disahkan. Hal ini karena seluruh sekolah dasar di Jawa Tengah Wajib menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan reaksi yang cukup beragam, terutama dari kelompok masyarakat yang tidak berbahasa Jawa Kromo dan bahasa Sunda. Tulisan ini hanya akan mendiskusikan reaksi orang Sunda yang merupakan kelompok etnis minoritas di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penduduk asli setempat.

Pendapat dari masyarakat ini dihimpun melalui wawancara dilakukan selama dua jam. Kemudian, di dalam wawancara ada dua pertanyaan pokok yang didiskusikan: (1) Apa yang Anda rasakan dan (2) yang Anda lakukan ketika kebijakan bahasa Jawa diterapkan di seluruh Provinsi Jawa Tengah? Kedua pertanyaan ini penting karena perasaan dan tindakan/perilaku merepresentasikan kesetujuan ataupun penolakan.

DM (50 tahun), saat ditemui di Kabupaten Salem, merupakan seorang guru Sekolah Dasar yang telah mengajar selama 30 Tahun dan akan segera pensiun di bulan Mei 2021. Di sekolah ia merupakan seorang guru Kelas 3 di SDN 1 Kabupaten Salem. Selain menjadi guru, DM juga seniman Sunda yang mengaku mempelajari teknik menyanyi lagu-lagu berbahasa Sunda (*nembang*) secara otodidak. Ia juga mengaku mampu bermain suling dan kendang. Di sore hari, terutama ketika virus korona belum merumahkan anak-anak, ia melatih anak didiknya mempelajari berbagai cabang olahraga dan kesenian Sunda. Sebagai seorang Guru dan seniman, peneliti melihat bahwa DM memiliki semangat yang tidak ada habisnya ketika membicarakan berbagai hal berkaitan tentang orang Sunda dan keseniannya.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan mulok bahasa Jawa, DM mengaku mengetahui hal tersebut dan dengan tegas ia menyatakan ketidaksetujuannya. DM menuturkan, “Saya merasa, … sudah merdeka tujuh puluh sekian tahun tapi sistem penjajahan masih…ada. …. Mestinya ada kebebasan, *begitu*. Kalau wilayah yang berbahasa Sunda biarkan saja bahasa Sundanya yang dikemukakan.” Perasaan terjajah yang diungkapkannya didukung pula oleh argumentasi. Sehari-hari, di sekolah dan rumah, DM berbahasa Sunda dengan semuanya dan menurutnya semua orang Salem ini berbahasa Sunda. Akan tetapi, saat ini kondisi bahasa Sunda di generasi muda sudah berubah dan cenderung tidak berbahasa daerah. Hal ini karena tuntutan zaman yang menginginkan bahasa Indonesia dan ini terjadi pada bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Batak dan Jawa. Lama-kelamaan bahasa ibu akan hilang. Hal seperti ini lumrah saja tetapi kalau kami (orang Sunda) harus mengikuti kebijakan pengajaran bahasa Jawa karena persoalan kepunahan bahasa Jawa itu sebuah pemaksaan karena harus ikut apa yang diputuskan. Dalam hal pengajaran bahasa lokal, selayaknya kebudayaan setempatlah yang digunakan sebagai panduan. Selain itu, seharusnya Provinsi Jawa Tengah berbangga dengan keberagaman etnis di daerahnya dan menopang semuanya.

Saat ini, ketika kebijakan mulok bahasa Jawa diterapkan, ia mendapati ketidaksiapan sekolah. Hal ini ditandai dengan ketiadaan guru bidang studi bahasa Jawa. Materi yang selama ini diajarkan ialah aksara Jawa dan itupun guru kesulitan karena mengajarkan bahasa kan bukan sekedar cara menulis, tetapi bagaimana bahasa digunakan. Sekarang ini yang diajarkan bahasa Jawa yang tidak pernah didengar juga di Brebes karena bahasa Jawa Jogja-Solo yang dipakai. Ini kesulitan lainnya. Pak DM menyatakan, “Kami hanya sekedar guru yang paling bawah ini … kerepotan.” Kesulitan dalam pengajaran bahasa Jawa ini selayaknya dievaluasi karena masyarakat Sunda di Jawa Tengah juga memiliki budaya sendiri yang mestinya harus muncul. Sebagai bentuk *resistensi* sekaligus *adaptasi*, akhirnya, sekolah tetap mengajarkan bahasa Jawa sambil melakukan berbagai aktivitas luar sekolah dengan beragam kesenian Sunda, seperti nembang, calung, tarian Sunda, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

> *Language management refers to the formulation and proclamation of an explicit plan or policy, usually but not necessarily written in a formal document, about language use. As we will see, the existence of such an explicit policy does not guarantee that it will be implemented and, nor does implementation guarantee success.*
>
> (Sumber: Spolsky, 2004:11)

Kebijakan bahasa merupakan bagian dari manajemen bahasa. Spolsky dalam kutipan di atas menegaskan bahwa kebijakan bahasa tidak selalu tertulis dan yang tertulis dalam kebijakan tidak selalu sesuai dengan keadaan faktual. Ini artinya bahwa seringkali ada jurang antara kebijakan dan realitas. Apa yang dikemukakan oleh Spolsky (2004) di atas tampaknya seperti yang terjadi di komunitas Sunda-Brebes. Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, wilayah ini wajib menerapkan kebijakan bahasa Jawa yang tertulis secara resmi oleh Pemda. Akan tetapi, masyarakat berkehendak lain, sehingga kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berterima karena masyarakat yang menjadi sasaran berbeda etnis dan bahasa.

Sebagaimana layaknya sebuah kelompok etnis tentu bahasa etnisnyalah yang ideal menjadi kebijakan di wilayahnya. Akan tetapi, tampaknya Pemda Provinsi Jawa Tengah belum memberikan perhatian yang setara kepada seluruh kelompok etnis di wilayahnya. Hal ini kemudian menyisakan perasaan tidak diperhatikan ataupun termarginal. Apa yang terjadi ini kemudian mengingatkan penulis dengan apa yang terjadi ketika masa Orde Baru, yaitu setiap provinsi memilih satu kelompok etnis mayoritas, secara kualitatif maupun kuantitatif, sebagai penanda identitas provinsi. Padahal, masyarakat Indonesia telah pula dipahami plural secara etnis dan dan multilingual secara bahasa.

Komunitas minoritas secara kuantitas Sunda-Brebes merupakan contoh nyata kesenjangan dalam akses hak kultural. Hal ini, disadari atau tidak telah menimbulkan resistensi. Dalam konteks pendidikan, resistensi disalurkan dalam bentuk beragam kegiatan kultural Sunda. Selain itu, pendidikan bahasa Jawa pun tidak secara serius digarap oleh Pemda sebagai cita-cita bersama. Sehingga persoalan praktis seperti kekurangan guru dan materi penelitian serta kemajuan belajar siswa tidak menjadi prioritas dan akhirnya kebijakan hanya menjadi retorika sekedar dan jauh dari tujuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Telah dipaparkan bahwa terdapat kebijakan bahasa lokal yang tidak sesuai dengan sekelompok kecil masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Apa yang terjadi ini memberikan gambaran bagaimana Pemda bekerja tanpa memperhatikan masyarakatnya yang plural. Simplifikasi kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat ini karena ada hak kultural yang tidak dipenuhi. Padahal etnisitas merupakan identitas sama pentingnya dengan aspek agama yang merupakan pemarkah masyarakat Indonesia. Dengan ratusan jumlah bahasa yang ada dan jumlah penutur bahasa yang relatif tidak setara, sudah selayaknya apabila kebijakan bahasa lokal juga memperhatikan etnis minoritas sehingga kesetaraan hak dan keberagaman bahasa di Indonesia tetap terjaga. Dengan demikian, kebijakan yang bersifat homogen tidak perlu dipertahankan di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPDP dan PRN 2, IPSK-LIPI, yang telah membiayai penelitian ini.

REFERENSI

Ebenhard, D.M., Simons, G.F. & Fennig, C. D (ed.). 2021 *Ethnologue: Languages of the world.* Dallas, Texas: SIL International. Pada laman http://www.ethnologue.com.

Jawa Tengah. 2021. *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*. Diambil kembali dari https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jawa_Tengah&oldid=18428646

Kontributor Wikipedia. 2021. *Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Brebes*. Diambil kembali dari Wikipedia: Ensiklopedia Bebas: http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Brebes&oldid=18111333

Noorduyn, J. 2019. *Perjalanan Bujangga Manik Menyusuri Tanah Jawa: Data Topografis dari Sumber Sunda Kuno.* Jakarta: KITLV-Jakarta.

Spolsky, B. 2004. *Language Policy.* Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge.

Suryadinata, L., Arifin, E. N., & Ananta, A. 2003. *Indonesian's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Pasir Panjang, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Imelda
Institusi : Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Pendidikan : S2 Linguistik
Minat Penelitian : Revitalisasi dan Kebijakan Bahasa